

TESIS

**PROBLEMATIKA PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA
BAWASLU DAN SENTRA GAKKUMDU TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN POLITIK UANG
STUDI KASUS PELANGGARAN POLITIK UANG PADA
PILKADA SERENTAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020**



BERKAT

No. Mhs.: 185202912/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2022**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Berkat
Nomor Mahasiswa : 185202912
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul proposal tesis : **PROBLEMATIKA PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA BAWASLU DAN SENTRA GAKKUMDU TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN POLITIK UANG. STUDI KASUS PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.**

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. Hyronimus Rheti, S.H., LL.M

1 Maret 2022

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.hum

26 Maret 2022



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS




Nama : Berkat

Nomor Mahasiswa: 185202912

Konsentrasi : Hukum Tata Negara/Kenegaraan

Judul Tesis : **PROBLEMATIKA PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA BAWASLU DAN SENTRA GAKKUMDU TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN POLITIK UANG. STUDI KASUS PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.**

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 12 / April / 2022.

Dewan Penguji	Nama	Tanda tangan
1. Ketua	Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.hum	
2. Sekertaris	Dr. Hyronimus Rithi, S.H, LL.M	
3. Anggota	Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum	

Ketua Program Studi



Dr. Hyronimus Rithi, S.H, LL.M

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y. Satrio Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BERKAT

Nomor Mahasiswa : 185201912

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“PROBLEMATIKA PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA BAWASLU DAN SENTRA GAKKUMDU TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN POLITIK UANG. STUDI KASUS PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila dikemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Maret 2022

Yang menyatakan:

BERKAT

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih yang telah memberikan berkat, hikmat dan pengertian kepada penulis, sehingga penyusunan tesis yang berjudul “Problematika Perbedaan Pendapat Antara Bawaslu dan Sentra Gakkumdu Terhadap Penegakan Hukum Penyelenggaraan Politik Uang. Studi Kasus Pelanggaran Politik Uang Pada Pilkada Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2020” dapat diselesaikan.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dalam penulisan tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu dan mendorong penulis, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat dan yang saya kasihi:

1. Bapak Dr. Hyronimus Rithi, S.H, LL.M, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dan selaku Pembimbing I/ Penguji yang telah membantu memberikan bimbingan dan petunjuk bagi penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. W Riawan Tjandra, SH., M.Hum selaku Pembimbing II/ Penguji yang telah membimbing dan sangat banyak memberikan petunjuk bagi penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Ign. Sumarsono, SH., M.Hum selaku Anggota/Penguji yang telah memberikan masukan dan petunjuk bagi perbaikan penyusunan tesis ini.

4. Bapak/Ibu dosen pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Drs. Mido Singgin Mahar, S.Pd dan Ibu Dra. Lida Kristalina Nyadam, S.Pd, yang tidak pernah berhenti medoakan penulis tiap harinya, dan selalu memberikan dukungan baik secari materi dan imateril kepada penulis hingga bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Saudara-saudaraku Mathias Perdana Mido Mahar dan Giat Mido Mahar, yang selalu mengingatkan dan selalu mendukung penulis dalam setiap perjuangan penulis. Terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya dari penulis.
7. Saudara Cahyono yang juga ikut menemani dan menyemangati penulis dalam penulisan tesis ini Terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya dari penulis.
8. Ucapan terimakasih dan hormat penulis yang begitu besar kepada Bapak/Kakak/Teman Kerja Advokat Albertus Iswadi, SH, yang telah banyak mengajari penulis dan menjadi teman diskusi yang baik terkait pengetahuan hukum di lapangan, terutama hukum kepemiluan, melalui beliau penulis memiliki kesempatan untuk terjun langsung kedalam praktek hukum kepemiluan pada Pilkada Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2020.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan dukungan dan bantuan hingga penulisan ini selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini sangat diharapkan bagi tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat

bagi pembaca pada umumnya dan dunia Pendidikan teerkhususnya pada bidang ilmu hukum, terkait hukum pemilihan.

Penulis,

BERKAT



ABSTRAK

Penelitian hukum Problematika Perbedaan Pendapat Antara Bawaslu Dan Sentra Gakkumdu Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Politik Uang, Studi Kasus Pelanggaran Politik Uang Pada Pilkada Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2020. Bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji problematika perbedaan pendapat antara Bawaslu dan unsur lain dalam Sentra Gakkumdu, kemudian upaya agar Bawaslu dan Unsur lain pada Sentra Gakkumdu dapat optimal dalam Penegakan hukum pelanggaran politik uang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi Pustaka . bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu sebagai lembaga mandiri yang bertugas sebagai pengawas dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah masih belum menunjukkan kemandirian secara penuh, terutama pada saat penanganan pelanggaran pidana politik uang. adanya perbedaan pendapat dengan unsur kepolisian dan unsur kejaksaan menunjukkan Bawaslu belum memiliki kemandirian dalam menindak pelanggaran politik uang. Maka, perlu adanya *empowering* terhadap Bawaslu. Bawaslu harus diberikan kewenangan untuk dapat melakukan penyidikan dan penuntutan dengan mengangkat penyidik kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penuntutan dengan arahan dari Bawaslu.

Kata Kunci: Perbedaan Pendapat, Kewenangan, Bawaslu, Politik Uang.

ABSTRACT

Legal research on the Problematics of Differences Of Opinion Between Bawaslu and Gakkumdu Center Against Law Enforcement of Money Politics Violations, Case Studies of Money Politics Violations in Pilkada of Bantul 2020. Aims to identify and examine the problematic of differences of opinion between Bawaslu and other elements in Gakkumdu Center, then efforts Bawaslu and Another element in the Gakkumdu Center can be optimal in law enforcement of money politics violation. This thesis research is a normative research with a conceptual approach and a statutory approach sources of data in the from of secondary data consisting of primary materials and secondary materials. Methods of data collection using library studies. Primary legal materials and secondary legal materials were analyzed using the legal analysis method. Deductive thinking proces is used to draw conclusions. The results of this study indicate that Bawaslu as an independent institution that serve as a supervisor in the process of the Regional Head General Election has not yet shown full independences, especially when handling money politics violations. The existence of differences of opinion with elements of the police and elements of the prosecutor's office shows that Bawaslu does not yet have the independence in taking action against violations of money politics. So, it is necessary to empore Bawaslu.

That Bawaslu must be given the authority to be able to carry out investigations and prosecutions by appointing police investigators and the prosecutor's office to carry out prosecutions under the direction of Bawaslu.

Keywords: Difference of Opinion, Authority, Bawaslu, Money Politics.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	22
E. Keaslian Penelitian.....	23
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Penegakan Hukum.....	32
B. Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	34
C. Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	40
D. Politik Uang.....	50
E. Landasan Teori.....	51
1. Teori Negara Hukum.....	52
2. Teori Independensi.....	53
3. Teori Pengawasan.....	55
F. Batasan Konsep.....	57
BAB III. CARA PENELITIAN.....	59
A. Jenis Penelitian.....	59

B. Pendekatan	59
C. Data	60
D. Analisi	63
E. Pola Berpikir	63
F. Sistematika Penulisan	64
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Monografi Kabupaten Bantul	65
B. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum	68
1. Landasan Yuridis	69
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010	70
3. Tugas dan Kewenangan Bawaslu	74
C. Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 ..	78
D. Politik Uang Pada Pilkada Bantul Tahun 2020	80
E. Problematika Perbedaan Pendapat Antara Bawaslu Dengan Unsur Lain di Sentra Gakkumdu Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Politik Uang Pada Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2020	81
1. Perbedaan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana	81
2. Sentra Penegakan Hukum Terpagu (Sentra Gakkumdu)	85
3. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017	89
4. Analisa Perbedaan Pendapat Dalam Penegakan Hukum Politik Uang	91
5. Politik Uang Menjadi Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	97
F. Upaya Agar Bawaslu Dapat Menjadi Lembaga Yang Mandiri Dalam Penegakan Hukum Politik Uang Kedepannya	98
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
DAFTAR GAMBAR	
1. Gambar 1. 1: Struktur Organisasi Kabupaten Bantul	75
2. Gambar 1.2 : Pasangan calon Pilkada Bantul Tahun 2020	79

3. **Gambar 2. 1:** Skema Penanganan Pelanggaran Pidana Ius constitutum 100
4. **Gambar 2. 2:** Skema Penanganan Pelanggaran Pidana ius constituendum. 100

